



## Sejumlah Daerah Buka Posko Pengaduan UMK DIY Naik 10 Persen

**YOGYA (KR)** - Setelah melalui pembahasan yang cukup cermat serta proses dialog yang melibatkan sejumlah pihak, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2014 di masing-masing kabupaten/kota. Meski besaran UMK antara kabupaten/kota satu dengan lainnya bervariasi, tapi jika dibandingkan dengan tahun 2013, kenaikannya berkisar 10 persen.

"Penetapan UMK 2014 telah berdasarkan pada rekomendasi dari tripartit yang terdiri dari dewan pengupahan, SPSP dan Apindo. Adapun dasar yang digunakan untuk menentukan UMK adalah dari survei KHL. Dari yang diusulkan, mengalami perubahan sedikit, bahkan beberapa ada di antaranya meningkat," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sesuai rapat penetapan UMK dengan

**\*Bersambung hal 7 kol 1**



Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DIY		
Kabupaten/ Kota	2013	2014
• Yogyakarta	Rp 1.065.247	Rp 1.173.300
• Sleman	Rp 1.026.181	Rp 1.127.000
• Bantul	Rp 993.484	Rp 1.125.500
• Kulonprogo	Rp 954.339	Rp 1.069.000
• Gunungkidul	Rp 947.114	Rp 988.500

Sumber: Gubernur DIY  
Grafis: JDS  
KR-Ety Widono Putra

Gubernur DIY didampingi seluruh bupati dan walikota se DIY menjelaskan tentang UMK 2014.

# UMK

Sambungan hal 1

Bupati/Walikota se-DIY, di Kompleks Kepatihan, Rabu (13/11).

Menanggapi keputusan ini, Anggota DPR RI Ambar Tjahyono SE menyatakan, kebijakan ini harus didukung semua pihak. "Ini merupakan keputusan yang ideal, karena mencerminkan hubungan yang harmonis di antara pihak terkait. Ini merupakan solusi terbaik untuk Yogya. Artinya, perolehan pekerja memang harus naik, namun tetap terukur, dengan mengingat kondisi dunia usaha yang juga masih berjuang. Selain itu, sertifikasi terhadap pekerja harus dilakukan agar ke depan tidak terjadi permasalahan," katanya kepada *KR*, Rabu malam.

Saat menyampaikan UMK 2014 tersebut Gubernur DIY didampingi Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Bupati Sleman Sri Purnomo, Bupati Bantul Sri Surya Widati, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan Bupati Gunungkidul Badingah.

Sultan mengungkapkan, penetapan UMK memiliki pertimbangan-pertimbangan seperti kondisi riil, inflasi, harga-harga yang naik dan mempertimbangkan problem yang ada di pengusaha seperti biaya impor komponen, perbedaan kurs dan lain-lain. Bagi dunia usaha yang keberatan karena tidak mampu untuk membayar karya-

wan sesuai UMK, masih ada penangguhan-penangguhan. Kendati begitu, keputusan yang diambil sudah sesuai dengan kesepakatan bersama berdasar tripartit.

Sementara itu Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan meskipun sebelumnya pembahasan UMK Sleman sempat alot, namun setelah ada keputusan dari Gubernur DIY akhirnya disepakati muncul angka sebesar Rp 1.127.000. UMK Sleman 2014 tersebut dinilai sudah mengakomodir kesepakatan dari tripartit antara pengusaha yang tergabung dalam Apindo, serikat pekerja yang mengusulkan untuk ditingkatkan dan pemerintah daerah.

Komentar serupa dikemukakan oleh Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Menurutnya, untuk Kota Yogyakarta, jika dibandingkan dengan KLH dan UMK tahun sebelumnya, UMK-nya tergolong sudah mengalami kenaikan (naik 10,14 persen). Mengingat dalam penentuan UMK sudah melalui pertimbangan yang matang dan cermat, termasuk dewan pengupahan, pihaknya berharap tidak ada yang keberatan.

"Dalam musyawarah terkait dengan UMK ini kami sudah melibatkan dewan pengupahan, mudah-mudahan saja bisa mewakili semua kalangan," tandas Haryadi. (Ria/\*-24)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005